

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.1**

**Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Berau Tahun Sebelumnya**

<b>NO.</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
1.	Melakukan perbaikan Renstra berikutnya dengan menambahkan Indikator Kinerja Tujuan dan Target Keberhasilan	Renstra periode 2016 -2021 telah berakhir tahun 2021 sehingga akan di lakukan Perbaaian pada Renstra periode 2021 - 2026
2.	Renstra di implementasikan pada semua tingkat dokumen perencanaan agar selaras , jika ada perubahan pada turunan Renstra sampai menjadi DPA	Telah di Lakukan dengan Membuat Renja DPPKBP3A Tahun 2020
3,	Membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja termasuk pengumpulan data atas rencana aksi dan membuat Tim Pengumpul Data.	Telah di buat SOP pengumpulan Data
4.	Menyajikan Data pembandingan secara lengkap, baik dari pembandingan data kerja tahun sebelumnya maupun perbandingan lain yang relevan	Tindaklanjut dengan membuat data pembandingan kinereja pada LKjIP Tahun 2020
5.	Menyajikan Informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada suatu sub bab khusus.	Telah di sajikan informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada suatu sub bab khusus LKjIP tahun 2020

Pengukuran Kinerja di gunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah di tetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan misi instansi pemerintah.

Pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran atas indikator kinerja dari sasaran strategis. Adapun cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis di lakukan dengan membuat capaian rata – rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja berdasarkan klasifikasi berikut :

**Tabel 3.2**  
**Kriteria Skala Nilai Serapan Kinerja**

<b>SKALA PENILAIAN</b>	
<b>SKALA NILAI</b>	<b>KATEGORI PENILAIAN</b>
➤ 100	SANGAT BAIK
80 > 100	BAIK
➤ 55 – 80	SEDANG
< 55	KURANG

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak – pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah di tetapkan dalam dokumen Rencana Strtegis / Penetapan Kinerja.

Dengan pengukuran Kinerja ini kita dapat membandingkan Capaian kinerja kita tahun ini dan kinerja tahun lalu sebagai bahan evaluasi untuk Langkah – langka kedepan apa yang harus dilakukan Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan selanjutnya. Untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau melakukan beberapa hal :

1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka peningkatan kinerja dari semua bidang.
2. Melakukan Pelatihan dan Roadshow pada OPD dalam rangka Peningkatan Pemahaman OPD dalam Penganggaran Perencanaan Penganggaran Responsip Gender (PPRG)
3. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan KLA

4. Penanganan kasus yang dilaporkan pada UPT
5. Melakukan peningkatan SDM mengikuti pelatihan bagi konselor dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Melakukan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dengan melakukan Sosialisasi dan Pendampingan melalui PUSPAGA
7. Melakukan Pelatihan dan Trauma Healing bagi wanita korban kekerasan
8. Melakukan Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi kepada Organisasi Wanita Kabupaten dan Kelompok Desa Prima
9. Melakukan Pelayanan KB bagi keluarga Miskin yang ada di Kecamatan
10. Melakukan Pelatihan Jaminan Pelayanan KB untuk Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi Petugas KB ( Bidan , dr Praktek dan Bidan Praktek )
11. Melakukan pengelompokan sasaran kinerja pada kampung KB yang menjadi tujuan kerja dari semua Bidang.
12. Melakukan Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Kepada Kelompok Kelomp PIK-R. UPPKS , BKB, BKR dan BKL
13. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja dari bidang – bidang.
14. Melakukan usulan penambahan kendaraan baik roda 2 dan roda 4 menunjang operasional jemput antar Askseptor KB.

Dengan melakukan beberapa hal tersebut di atas di harapkan yang menjadi tujuan, dan sasaran kerja dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Anak Kabupaten Berau dapat di laksanakan dengan baik mencapai target yang telah di tentukan. Serta di harapkan dengan terlaksanakannya semua program kegiatan tersebut dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan dalam pelaksanaannya Tugas dan fungsi dan tercapainya pelayanan pada masyarakat baik dalam hal ber KB atau Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak.

### **3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran yang akan di capai dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebanyak 4 ( empat ) sasaran. Capaian sasaran di ukur berdasarkan Indikator Kinerja yang telah di tetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Bupati Berau dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau pada Tahun 2020. Evaluasi dan Analisa terhadap Capaian Kinerja mutlak dan wajib di laksanakan

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan DPPKBP3A yang akan datang, evaluasi dan capaian kinerja dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan anantara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2020) dengan tahun sebelumnya (2019) dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi Kinerja dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisa Penyebab keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana
6. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Kinerja yang disertai evaluasi dan Analisis Kinerja masing – masing sasaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau sebagai berikut :

**Sasaran :**

**I. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender**

**II. Meningkatnya Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang memerlukan Perlindungan Khusus**

**III. Meningkatnya Implementasi Kabupaten / Kota Layak anak ( KLA )**

Indikator keberhasilan dari capaian kinerja sasaran I, II, III dapat dilihat dari tabel 3.3

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis I, II, III**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja (%)	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender	Presentase OPD yang sudah melaksanakan PPRG	29,8 %	0 %	0 %	0%	0%	42,56 %

2	Meningkatkan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Presentase Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%
3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak ( KLA )	Madya (650) Poin	Pratama (599) Poin	92,15 %	80 %	85 %	92,31 %

**Tabel 3.4**

**Capaian Anggaran Program Sasaran Stategis I, II, III**

No.	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	ANGGARAN		Capaian Anggaran (%)
		TARGET	REALISASI	
1	2	4	5	6
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp.1.591.048.960,-	Rp. 1.374.503.352,-	86,39 %
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 62.087.960,-	Rp. 48.112.000,-	77,49 %
3	Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp. 296.892.750,-	Rp. 200.141.800,-	67,41 %

Berdasarkan Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 Realisasi Kinerja berdasarkan Sasaran strategis I,II, III dan Capaian Anggaran Program Sasaran Strategis tahun 2020 sebagai berikut :

1. **Harapan** Meningkatkan implementasi pengarusutaman gender dengan indikator kinerja Prosentase OPD yang melaksanakan PPRG ( Perencanaan Penganggaran Responsip Gender ) target 29,8 % dari 11 OPD di Kabupaten Berau yang akan di tingkatkan implementasi PUG melalu Pelatihan dan Roadshow pada tahun 2020 . Sehingga di tahun 2020 diharapkan bertambah 11 OPD lagi memahami cara membuat anggaran yang responsive gender ( ARG ) dari 47 OPD di Kabupaten Berau.

**Kondisi yang dicapai :**

Pada tahun 2020 sasaran kinerja pelaksanaan kegiatan peningkatan implementasi PUG dengan target 29,8 % dari 11 OPD yang diharapkan mengikuti pelatihan PUG melalui PPRG tidak dapat dilaksanakan sehingga capaian target kinerja 0 % hal tersebut **menunjukkan adanya pencapaian yang sangat tidak memuaskan .**

**Perbandingan Capaian Sasaran Strategi Tahun 2020 dengan Tahun 2019 :**

Realisasi Sasaran Kinerja tahun 2019 Capaian dapat di tingkatkan menjadi 20 Opd dari 47 OPD yang ada di Kabupaten Berau sehingga prosentase capaian sebesar 42, 56 % hal tersebut di anggap sangat baik karena ada kenaikan target sebesar 19,15 % perbandingan dengan tahun ini tahun 2020 sebesar 0% maka di tahun 2020 tidak terjadi peningkatan masih lebih baik capain sasaran kinerja pada tahun 2019.

2. **Harapan** Meningkatkan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus dengan indikator kinerja Presentase Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak target 100% dari kasus yang terlapor dan kasus yang di tangani.

**Kondisi yang dicapai :**

Pada tahun 2020 sasaran kinerja Presentase Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak target kinerjanya 100% dari kasus yang terlaporkan dan kasus yang di layani . Realisasi kinerja tahun 2020 tercapai 100 % sesuai target dari 73 kasus yang di laporkan terhadap 73 kasus yang di tangani. **Hal tersebut menunjukkan adanya pencapaian target yang sangat memuaskan .**

### **Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2020 dengan tahun 2019**

Realisasi target sasaran strategi tahun 2019 tercapai 100% dari Kasus yang terlapor 67 Kasus dan kasus tertangani 67 Kasus. Pebandingan realisasi tahun 2020 capaian Sasaran 100% dari realisasi 73 kasus terlaporkan dan kasus yang ditangani. Pebandingan dianggap bahwa capain tahun 2020 sudah sangat memuaskan walaupun adanya peningkatan kasus dari 67 kasus menjadi 73 kasus . Hal tersebut mencerminkan bahwa DPPKBP3A telah melakukan pelayanan dan memfasilitasi semua laporan kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang datang ke UPT PPA.

3. **Harapan** Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan indikator kinerja Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA) Target kinerja Madya (650) Poin

#### **Kondisi yang dicapai :**

Pada tahun 2020 sasaran kinerja Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA) Target kinerja Madya (650) Poin dengan . Realisasi kinerja tahun 2020 tercapai Pratama ( 599 ) poin dengan prosentase 92,15 % . **Hal tersebut menunjukkan adanya pencapaian target yang kurang memuaskan .**

### **Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2020 dengan tahun 2019**

Realisasi target sasaran strategi tahun 2019 tercapai 92,31 dengan poin (600) poin dan tingkatan Pratama. Ada penurunan 0,16 % dari capaian tahun lalu. Namun penilaian masih pada klaster yang sama yaitu Pratama tidak ada peningkatan untuk mencapai Madya.

4. Sasaran Strategis I, II, III dari tabel 3.3 dan tabel 3.4 yang dilakukana DPPKBP3A dengan melakukan program dan kegiatan sebagai berikut :
- Program Kegiatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Geder dan Anak Total Anggaran sebesar Rp.1.591.049.000,-
  - Input dari Program kegiatan terdiri dari beberapa kegiatan :
    1. Pelatihan dan Road Show PUG melalui PPRG dana Rp, 80.795.200,-
    2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan PPA dana Rp. 281,398.260,-
    3. Kabupaten Layak Anak (KLA) dana Rp, 220.402.000,-
    4. Fasilitas Penguatan Kelembagaan PUSPAGA berbasis Anak dana Rp.197.367.000,-
    5. Pemenuhan Hak Anak dana Rp. 134.248.000,-

6. Fasilitasi Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dana Rp. 676.838.500,-

- Output dari Program kegiatan adalah Presentase Lembaga Layanan Perlindungan perempuan dan Anak (Pusat Layanan Terpadu) dengan target 100 % dari kasus yang dilaporkan dan kasus yang terlayani.
- Outcome dari Program Kegiatan adalah Presentase Lembaga Layanan Perlindungan perempuan dan Anak (Pusat Layanan Terpadu) dengan capaian 81,16 % dari Fisik kegiatan ( dari rata – rata Capaian Realisasi kinerja sasaran strategi I, II, III ) dan 86,39 % dari realisasi Fisik Keuangan Rp. 1.374.503.352,- dari Anggaran Rp.1.591.048.960,- Adanya penghematan anggaran sebesar Rp. 216.545.608.-

**Sasaran :**

**IV. Keikut Sertaan Pasangan Usia Subur ( PUS) Menjadi KB Aktif**

Indikator keberhasilan dari capaian kinerja sasaran IV dapat dilihat pada tabel 3.5

**Tabel 3.5**

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja (%)	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Keikut Sertaan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi KB Aktif	Presentase Pemakaian Kontrasepsi ( CPR)	76,03 %	74,83 %	74,83	74,75 %	75,66 %	76,54 %

**Tabel 3.6**

**Capaian Anggaran Program Sasaran Strategis IV**

No.	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	ANGGARAN		Capaian Anggaran (%)
		TARGET	REALISASI	
1	2	4	5	6
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.359.376.300,-	Rp. 1.300.374.084,-	95,66

5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	100
6.	Program Keluarga Berencana	Rp. 3,641.358.834,-	Rp. 2,940.347.262,-	80,73
7.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp. 111.024.500,-	Rp. 110.334.068,-	99,38
8.	Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera	Rp. 138.679.000,-	Rp. 135.679.000,-	97,61

Berdasarkan Tabel diatas Realisasi Kinerja berdasarkan Sasaran strategis IV dan Capaian Anggaran Program Sasaran Strategis tahun 2020 sebagai berikut :

5. **Harapan** Keikut Sertaan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi KB Aktif dengan indikator kinerja Presentase Pemakaian Kontraseps ( CPR) target 76,03 % dari kesertaan KB aktif 35.633 Akseptor di banding Pasangan Usia Subur 46.869 di Kabupaten Berau yang akan di tingkatkan dalam keikut sertaan ber KB menjadi 76,03 % dari Tahun lalu 75,84 % di Kabupaten Berau.

**Kondisi yang dicapai :**

Pada tahun 2020 sasaran kinerja pelaksanaan program kegiatan Keluarga Berencana dengan target 76,03 % dan realisasi capaian sasaran hanya 74,83 % hal tersebut **menunjukkan adanya pencapaian yang kurang memuaskan .**

**Perbandingan Capaian Sasaran Strategi Tahun 2020 dengan Tahun 2019 :**

Realisasi Sasaran Kinerja tahun 2019 Capaian dapat di tingkatkan menjadi 76,54 dari kesertaan KB aktif 34.536 Akseptor di banding Pasangan Usia Subur 45.615 hal tersebut di anggap sangat baik. Akseptor di banding Pasangan Usia Subur 45.615 . Perbandingan dengan Tahun 2020 sebesar 74,83 % dari kesertaan KB Aktif 35.633 Akseptor di banding Pasangan Usia Subur 46.869 di Kabupaten Berau maka di tahun 2020 tidak terjadi peningkatan masih lebih baik capain sasaran kinerja pada tahun 2019.

6. Sasaran Strategis IV dari tabel 3.5 dan tabel 3.6 yang dilakukana DPPKBP3A dengan melakukan program dan kegiatan sebagai berikut :
  - Program Kegiatan Keluarga Berencana Total Anggaran sebesar Rp. 3.641.358.834,-

- Input dari Program kegiatan terdiri dari beberapa kegiatan :
  1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin dana Rp, 110.577.199,-,-
  2. Penyediaan Sarana dan Prsarana KB DAK Fisik 2020 dana Rp.1.017,5000,-
  3. Bantuan Operasional KB ( DAK BOKB 2020) dana Rp, 2.061.785.000,-
  4. Pendampingan DAK BOKB dan DAK Fisik dana Rp. 81.497.435,-
  5. Sosialisasi / Pelatihan Jaminan Pelayanan KB bagi Klinik KB , dr Praktek dan Bidan Praktek Rp. 130.234.200,-
  6. Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi ( KIE ) Kreatif dana Rp. 239.764.000,-
- Output dari Program kegiatan adalah Prosentase Pemakaian Kontrasespsi (CPR)KB dengan target 76,03 % dari kesertaan KB aktif 35.633 Akseptor di banding Pasangan Usia Subur 46.869
- Outcome dari Program Kegiatan adalah Prosentase Pemakaian Kontrasespsi (CPR)KB dengan capaian 74,83 % dari Fisik kegiatan ( dari rata – rata Capaian Realisasi kinerja sasaran strategi IV ) dari kesertaan KB Aktif 35.027 dibanding 46.813 PUS Adapun realisasi Fisik Keuangan sebesar 80,76 % Rp. 2.940.847.262,- dari Anggaran Rp.3.541.358.834,- Adanya penghematan anggaran sebesar Rp. 700.511.572.-

### 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk mencapai visi dan misi Pembangunan Kabupaten Berau lima tahun kedepan di tetapkan dalam Renstra DPPKBP3A Kabupaten Berau periode Tahun 2016 – 2021 . Di dalam tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan di tetapkan APBD Kabupaten Berau untuk DPPKBP3A Anggaran Keseluruhan sebesar Rp. 12.748.342.344,-,- terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 7.220.467.344,- yang terbagi dalam 8 (delapan ) Program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Dan Belanja Tidak Langsung sebesar RP. 5.527.875.000,-

Realisasi dari Belanja Langsung capaian fisik keuangan sebesar RP. **6.129.675.566** prosentase ( **84,89** % ) pada skala kategori penilaian **Baik** dan Realisasi Fisik Kegiatan dengan prosentase ( **97,17** ) pada skala kategori **Baik**

Realisasi dari Belanja Tidak langsung tahun 2020 capaian fisik keuangannya sebesar Rp. 4.921.668.094,-,- prosentase ( **89,03 %** ) pada skala kategori ( **Baik** ) dan Realisasi Fisik kegiatannya prosentase ( **100 %** ) dengan skala kategori ( **Sangat Baik** )

Secara Keseluruhan Realisasi Anggaran DPPKBP3A dari Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11. 051.343.660,- dengan prosentase ( 86,69 ) pada skala kategori ( **Baik** ) dan Realisasi Fisk Kegiatan untuk Belanja Langsung dan Tidak langsung prosentase ( **98,59 %** ) pada skala kategori ( **Baik** ).

Berikut Anggaran dan Realisasi DPPKBP3A dan Kegiatan Tahun 2020 yang terdiri dari Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung tahun 2020 dengan Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan belanja Langsung Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2020**  
**Per 31 Desember 2020**

NO.	Belanja Langsung	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)
			(Rp)	( % )	
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Tidak Langsung	5.527.875.000,-	4.921.668.094,- ,-	89,03 %	606.206.906,-

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019**  
**Per 31 Desember 2019**

NO.	Belanja Langsung	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)
			(Rp)	( % )	
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Tidak Langsung	9.500.031.500,-	7.567.427.590,- ,-	79,66 %	1.932.603.910,-

Dari Tabel 3.7 dan 3,8 diatas dapat di bandingkan hasil capain kinerja tahun 2020 dengan prosentase ( 89,03 % ) kategori penilaian **Baik** sedangkan hasil capaian kinerja tahun 2019 dengan prosentase (79,66 % ) kategori penilaian **Sedang** dari hasil perbandingan tersebut hasil kinerja serapan anggaran tahun 2020 meningkat sehingga dapat di simpulkan dari segi perancangan dan serapan sudah di anggap **Baik**.

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Belanja Langsung Program / Kegiatan		Alokasi		Realisasi Fisik Kegiatan		Realisasi Keuangan		Sisa		
				Target Volume	Anggaran (Rp)	Vol.	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01.	Meningkatkan Implementasi Pengarusutan Gender	16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutan Gender dan Anak	100%	Rp.1.591.045.950,-,-	100%	100%	RP. 1.374.503.352,-	86,39 %	Rp. 216.545.608,-		
02.	Meningkatkan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus			03	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	5.	Pelatihan dan Road Show PUG melalui PPRG	25 OPD	Rp. 80.795.200,-	0 OPD	0 %	Rp.19.650.400,-
				6	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	40 orang/ 37 Orang/ 25 Orang	Rp. 281.398.260,-	128	125%	Rp. 259.438.600,-	92,20 %	Rp. 21.959.660,-
				10	Kabupaten Kota Layak Anak (KLA)	Madya (65) Poin	Rp. 220.402.000,-	Pratama 599	92,15 %	Rp. 176.163.500,-	79,93 %	Rp. 44.238.500,-
				13	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak Anak	2.500 Orang	Rp. 197.367.000,-	1.950 Orang	78 %	Rp. 190.670.432,-	96,61 %	Rp. 6.696.568,-
				15	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak Anak	33 FA	Rp. 134.248.000,-	21 FA	91,30	Rp. 107.159.840,-	79,82 %	Rp. 27.088.160,-

		16	Fasilitasi Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	100%	Rp. 676.838.500,-	100 %	100 %	Rp. 621.420.580,-	91,81 %	Rp. 55.417.920,-
		17.	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak</b>	100%	<b>Rp 62.087.000,-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 48.112.000,-</b>	<b>77,49 %</b>	<b>Rp. 13.975.000,-</b>
		8.	Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	23 orang	Rp. 62.087.000,-	23 Orang	100 %	<b>Rp. 48.112.000,-</b>	<b>77,49 %</b>	<b>Rp. 13.975.000,-</b>
		18	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan :</b>	100%	<b>Rp 296.892.7500,-</b>	100%	100%	<b>Rp. 200.141.800,-</b>	<b>67,41 %</b>	<b>Rp. 96.750.950,-</b>
		1.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	23 Organisasi	Rp. 210.800.000,-	23 Organisasi	100%	Rp. 144.178.800,-	68,40 %	Rp. 66.621.200,-
		8.	Expose Peningkatan Kualitas Perempuan dalam Pembangunan	1 Kali	Rp. 63.307.750,-	1 Kali	100%	Rp. 33.203.000,-	52,45 %	Rp. 30.104.750,-
		15.	Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima	6 Kelompok	Rp 22.785.000,-	6 Kel	100%	Rp. 22.760.000,-	99,89 %	Rp. 25.000,-
04.	Keikut Sertaan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi KB Aktif	15.	<b>Program Keluarga Berencana Kegiatan :</b>	76,0%	<b>Rp. 3.641.358.834,-</b>	<b>74,83 %</b>	<b>74,83 %</b>	<b>Rp.2.940.847.262,-</b>	<b>80,76 %</b>	<b>Rp. 700.511.572,-</b>
		1,	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	4 Kecamatan	Rp. 110.577.199,-	4 Kec	100%	Rp. 110.577.199,-	100%	Rp. 00,-
		11.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyaluran Keluarga Berencana	460 Unit	Rp 1.017.500.000,-	460 Unit	100%	Rp. 817.496.800,-	80,34 %	Rp. 200.003.200,-
		12.	Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik )	5 Kegiatan/ 362 Pertemuan	Rp. 2.061.786.000,-	282Per temuan	77,90 %	Rp.1.572.143.500,-	76,25 %	Rp. 489.642.500,-
		13.	Pendampingan DAK BOKB dan DAK Fisik	13 Kec	Rp. 81.497.435,-	12 Kec	92,31 %	Rp. 72.031.563,-	88,39 %	Rp. 9.465.872,-

		14.	Sosialisasi / Pelatihan Jaminan Pelayanan KB bagi Klinik KB, dr. Praktek dan Bidan Praktek	15 Orang	Rp. 130.234.200,-	15 Orang	100%	Rp. 128.834.200,-	98,93 %	Rp. 1.400.000,-
		17	Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi ( KIE) Kreatif Kamp. KB	30 Kamp.	Rp 239.764.000,-	30 Kamp	100%	Rp. 239.764.000,-	100%	Rp. 00,-
		<b>16</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	100 %	<b>Rp 111.024.000,-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 110.334.068,-</b>	<b>99,38 %</b>	<b>Rp. 690.432,-</b>
		3	Pembinaan PIK Remaja / Mahasiswa	6 Kelom pok	Rp. 111.024.000,-	6 Kel.	100%	Rp. 110.334.068,-	99,39 %	Rp. 690.432,-
		<b>23</b>	<b>Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b> Kegiatan :	100 %	<b>Rp. 138.679.000,-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 135.363.000,-</b>	<b>97,61 %</b>	<b>Rp. 3.316.000,-</b>
		1.	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS	13 Kelom pok	Rp. 82.143.500,-	13 Kelom pok	100%	Rp. 79.684.000,-	97,01 %	Rp. 2.459.500,-
		2.	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu - PAUD	15 Kelom pok	Rp 56.535.500,-	15 Kelom pok	100%	Rp. 55.679.000,-	98,49 %	Rp. 856.500,-
		<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> Kegiatan :	<b>100 %</b>	<b>Rp.1.359.376.300,-</b>	<b>100%</b>	<b>99,88 %</b>	<b>Rp.1.300.374.084,-</b>	<b>95,66 %</b>	<b>Rp. 59.002.216,-</b>
		1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Lembar	Rp. 3.400.000,-	600	100%	Rp. 3.398.000,-	99,94 %	Rp. 2.000,-
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Rp. 130.705.800,-	12 Bln	100%	Rp. 107.276.038,-	82,07 %	Rp. 23.429.762,-
		6.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	480 UB	Rp. 209.217.500,-	480 UB	100%	Rp. 208.968.720,-	99,88 %	Rp. 248.780,-
		7.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	185 OB	Rp. 116.193.000,-	185 OB	100%	Rp. 116,193,000,-	100%	Rp. 00,-
		8.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	550 Buah	Rp. 18.000.000,-	550 Buah	100%	Rp. 17.997.500,-	99,99 %	Rp. 2.500,-

	9.	Penyediaan Jasa Peralatan Kerja	46 Unit	Rp. 37.145.000,-	46 Buah	100%	Rp. 37.115.000,-	99,92 %	Rp. 30.000,-
	10.	Penyediaan ATK	600 Jenis	Rp. 21.000.000,-	600 Jenis	100%	Rp. 20.998.500,-	99,99 %	Rp. 1.500,-
	11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000 Lbr	Rp. 26.201.000,-	35.000 Lbr	100%	Rp. 26.145.000,-	99,79 %	Rp. 56.000,-
	12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	120 Buah	Rp 7.149.000,-	120 Buah	100%	Rp, 7.136.000,-	99,82 %	Rp. 13.000,-
	13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	Rp. 13.965.000,-	3 Unit	100%	Rp. 13.503.000,-	96,69 %	Rp. 462.000,-
	14.	Penyediaan Peralatan Rumag Tangga	20 Jenis	Rp. 12.250.000,-	20 Jenis	100%	Rp. 12.250.000,-	100%	Rp. 00,-
	15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	1.080 Eksemplar	Rp. 7.500.000,-	1.080 Eksemplar	100%	Rp. 6.580.000,-	87,73 %	Rp. 920.000,-
	17.	Penyediaan Makan dan Minum	25 kali Rapat	Rp. 84.500.000,-	25 kali Rapat	100%	Rp. 81.023.000,-	95,89 %	Rp. 3.477.000,-
	18.	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	20 Kali	Rp. 165.000.000,-	20 Kali	100%	Rp. 164.992.800,-	100%	Rp. 7.200,-
	19.	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	140 Kali	Rp. 55.000.000,-	140 Kali	100%	Rp. 54.950.000,-	99,91 %	Rp. 50.000,-
	20.	Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	150 OB	Rp. 452.150.000,-	147OB	98%	Rp. 421.847.526,-	93,30 %	Rp. 30.302.474,-
	<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan :</b>	<b>67,06 %</b>	<b>Rp. 20.000.000,-</b>	<b>75,04</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 20.000.000,-</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 00,-</b>
	9	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	9 Dokumen	Rp. 20.000.000,-	9 Dokumen	100%	Rp. 20.000.000,-	100%	Rp. 00,-
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>Rp.7.220.467.344,-</b>		<b>97,17 %</b>	<b>Rp.6.129.675.566,-</b>	<b>84,89 %</b>	<b>Rp.1.090.791.778,-</b>

Untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis yang telah ditetapkan maka DPPKBP3A Kabupaten Berau telah mengalokasikan anggaran baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak langsung Tahun 2020 sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Alokasi Belanja yang terfokus untuk menunjang tercapainya pelaksanaan Sasaran Strategis terdiri dari 8 Program yang meliputi :

**Untuk Pencapaian Sasaran I,II , III :**

- I. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender**
- II. Meningkatnya Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus**
- III. Meningkatnya Implementasi Kabupaten / Kota Layak Anak ( KLA )**

Yang di dukung Oleh Program :

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Rp. 1.591.048.960,-
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Rp. 62.087.960,-
3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Rp. 296.892.750,-

**Untuk Pencapaian Sasaran IV :**

- IV. Keikutsertaan Pasangan Usia Subur ( PUS ) menjadi KB Aktif**

Yang di dukung oleh Program :

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.359.376.300,-
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 20.000.000,-
6. Program Keluarga Berencana Rp. 3.641.358.834,-
7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Rp. 111.024.500,-
8. Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera Rp. 138.679.000,-

**Analisis Target Capaian Kinerja Keuangan DPPKBP3A Kabupaten Berau :**

Berdasarkan Kebijakan Keuangan yang telah ditetapkan dalam kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Berau tahun Anggaran 2020, Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan daerah pada OPD DPPKBP3A Kabupaten Berau adalah sebesar Rp. 12.748.342.344,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 5.527.875.000,- dan Belanja Langsung Rp. 7.220.467.344,-. Adapun

Realisasi dari total Target Kinerja Rp. 11.051.343.660,- dengan Prosentase ( 86,69 % ). Untuk Belanja Tidak langsung Realisasi sebesar Rp. 4.921.668.094,- dengan prosentase ( 89,03 ) dan Belanja Langsung Realisasi sebesar Rp. 6.129.675.566,- dengan prosentase ( 84,89 % )

Realisasi perencanaan kinerja keuangan belanja langsung sebesar (84,69 % ) secara umum Program dan Kegiatan APBD pada DPPKBP3A Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020 sudah terlaksanan dengan penilaian Baik dan realisasi fisik ( 97,17 % ) juga di anggap baik. Jika di dibandingkan dengan pencapaian kinerja Belanja Langsung tahun 2019 realisasi keuangan ( 79,66%) dan realisasi fisik ( 96,22 % ), pada Tahun Anggaran 2020 terjadi peningkatan capaian kinerja keuangan sebesar ( 5,03 % ) dan peningkatan capain kinerja fisik kegiatan sebesar ( 0,95 % ). Peningkatan terjadi karena pengaruh program kegiatan dapat di laksanakan secara keseluruhan walaupun ada kegiatan yang pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan target yang telah di tetapkan, akan tetapi hampir semua kegiatan dapat di laksanakan sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan tahun anggaran 2020.

Berdasarkan atas Program Kegiatan dan pencapaian sasaran / kegiatan secara umum Laporan DPPKBP3A kabupaten Berau telah berhasil mencapai sarannya. Adapun factor – factor utama penyebab keberhasilan :

1. Adanya komitmen pimpinan, dalam hal ini adalah Kepala Daerah yang sangat mendukung fungsi dan tugas pengendalian dan keluarga berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Terjalannya hubungan koordinasi yang mantap dan harmoni dengan para pimpinan unit instansi pemerintah daerah dan pemerintahan Vertikal yang akan memberikan dukungan atas program kerja Keluarga Berencana dan perlindungan Perempuan dan anak terhadap Kekerasan di kabupaten Berau.

**Permasalahan dan Kendala lain yang di hadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja DPPKBKP3A Kabupaten Berau Tahun 2020 adalah :**

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun Anggaran 2020 berjalan dengan baik walaupun ada kendala dengan kondisi terjadinya bencana Nasional yang melanda Indonesia terjadinya Pandemi Covid 19 yang mau tidak mau menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di rencanakan pada tahun 2020. Sehingga mempengaruhi bebrapa kegiatan yang tidak dapat di laksanakan dan realisasi kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang

sudah di tentapkn Adapun beberapa permasalahan yang di hadapi DPPKBP3A Kabupaten Berau dalam menjalankan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 sebagai berikut :

1. Tidak terlaksananya kegiatan Pelatihan dan Road Show PUG Melalui PPRG. Salah satu IKK Kabupaten Berau adalah Prosentase Anggaran Responsip Gender (ARG) terhadap Belanja Langsung APBD.

Dan untuk mengetahui apakah Pemerintahan Kabupaten Berau telah mendukung anggaran yang responsip gender atau belum dalam APBD dapat di ukur dengan menganalisa apakah semua OPD yang ada di Kabupaten Berau telah menganggarkan kegiatan yang responsip gender. Menganalisis Anggaran tersebut dengan menggunakan GAP ( Gender Analisis Patway ) dan GSB ( Gender Statemen Budget). Pada tahun 2019 OPD yang sudah di latih dan sudah melakukan beberapa analisis terhadap beberapa kegiatan sebanyak 20 OPD.

Untuk Anggaran Kegiatan Tahun 2020 di rencanakan iyang akan dilatih pembuatan ARG melalui PPRG sebanyak 26 OPD. Namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan di karenakan adanya bencana pandemic covid – 19 sehingga pelatihan di batalkan.

2. Tidak Tercapain target kinerja kota layak anak dengan peringkat (Madya). Dikarenakan Perda yang ada belum mencakup 5 klaster dari 24 Indikator KLA dan tida adanya evaluasi penilaian dari tim penilai KLA Pusat.
3. Tidak tercapainya target prosentase pemakaian Contrasepsi (PCR) sebesar 76,03 %.

Target PCR sebesar 76,03 % di harapkan KB Aktif sebesar 35.633 dibanding 46.809 PUS tahun 2020.

Realisasi PCR sebesar 74,24 % dari sebesar 35.134 KB Aktif di banding 47.323 PUS

Dilihat dari realisasi pada tahun 2020 pasangan usia subur meningkat 1,09 % kenaikan sekitar 514 pasangan sedangkan untuk pelayanan KB Aktif yang tidak terlayani dari perencanaan sebanyak 499 peserta KB Aktif. Hal tersebut di akibatkan tidak maksimalnya pelayanan akibat COVID 19 dan terbatasnya anggaran pelayanan KB untuk 13 Kecamatan di Kabupaten Berau

4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) khususnya staf .

Kekuatan personil atau sumber daya manusia ( SDM ) baik dalam jumlah maupun kualitas yang masih terbatas. Kemampuan kompetensi yang di miliki tersebut sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dimana DPPKBP3A Kabupaten Berau saat ini memiliki aparatur berjumlah 37 orang ASN dan 28 PTT . sementara yang di butuhkan staf adalah staf ASN.

5. Sarana dan Prasaran Kantor yang tidak memadai

Sarana dan prasaran sangat penting dalam menunjang kelancaran tugas pokok. Kondisi sarana dan prasana yang ada pada DPPKBP3A masih sangat terbatas dalam menunjang tugas dan fungsi DPPKBP3A.khususnya bangunan kantor yang masih terbatas ruang kerja untuk memfasilitasi seluruh pegawai yang ada. Bidang berjumlah 5 di tambah ruang sekretaris dan kepala Dinas serta UPT PPA. Untuk ruang yang ada hanya 1 ruang staf yang di gunakan untuk semua staf Bidang dan Sekretariat. Sedangkan ruang kepala Bidang hanya 4 ruangan dan 1 kepala Bidang tidak memiliki ruangan yang sesuai dengan ketentuan.

6. Pencatatan Aset yang belum tertib

Pada saat ini pencatatan aset menjadi penting bukan saja menjadi tanggung jawab dari pengelola aset namun bagaimana membangun kesadaran semua pihak akan pentingnya pengamanan Barang Milik daerah yang mana dari segi administrasi dokumen administrasi sangat penting dalam pengamanan Barang Milik Daerah. Sementara pada DPPKBP3A masih ada barang – barang Daerah yang masih belum tercatat dalam dokumen administrasi.

7. Masih adanya pembiayaan yang di butuhkan tidak sesuai dengan anggaran di karenakan kondisi yang tidak terduga.

Masih adanya pembiayaan pembiayaan yang di luar dari perencanaan dan perkiraan Anggaran namun biaya – biaya tersebut memang sangat di butuhkan. Misalnya dalam penanganan dan pencegahan Covid 19 ada himbauan untuk menyediakan prokes Kesehatan yang pada awal perencanaan tahun sebelumnya tidak di perkirakan.

Didalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala dan permasalahan yang di hadapi, maka strategis pemecahan yang di gunakan untuk masalah yang akan

datang adalah dengan mengatasi permasalahan program dan kegiatan dengan memberikan solusi sebagai berikut :

1. Akan melakukan pelatihan PUG melalui PPRG pada tahun 2021 kepada OPD yang belum mengikuti Pelatihan. dan berupaya untuk melakukan Road Show dan evaluasi Kembali kepada OPD yang telah memperoleh pelatihan pada tahun 2019
2. Melakukan Advokasi ke DPRD untuk membuat perda inisiatif tentang KLA atau merubah perda PA dengan memasukkan pasal – pasal sapu jagat ( Indikator 5 klaster dan 24 Indikator ) yang belum ada dalam perda teknis. Serta memaksimalkan koordinasi dengan gusus tugas KLA di tahun 2021 dengan Advokasi ke Kepala daerah.
3. Melakukan peningkatan KIE dan Konseling kepada masyarakat khususnya PUS untuk kesertan ber KB. Dengan melakukan peningkatan SDM PKB sehingga dapat memaksimalkan kegiatan lini lapangan dan melakukan pembinaan terpadu di kampung - kampung KB. Melakukan KIE kepada PIK R dan PIK Jalur Masyarakat tentang Reproduksi Remaja.
4. Memaksimalkan tenaga staf yang ada kemudian melakukan pendataan serta membuat analisis tentang kebutuhan ASN serta melakukan usulan kepada Bupati Berau melalui BKPP Kabupaten Berau untuk tenaga staf yang sesuai dengan standar kebutuhan yang di butuhkan.
5. Gedung Kantor DPPKBP3A masih memaksimalkan kondisi ruangan yang ada kemudian melakukan koordinasi kepada DPUPR dalam rangka permohonan Gedung Kantor yang maksimal untuk 5 Ruang Bidang, 1 Ruang Skretariat, 1 Ruang Skretaaris, 1 Ruang kepala Dinas, 1 Ruang Rapat, 1 Ruang Konsultasi dan 1 Kantor untuk UPT PPA..
6. Melakukan Pendataan ulang aset atau Rekon barang oleh petugas pengelola barang dan memberi sosialisasi kepada seluruh pegawai DPPKBP3A untuk dapat melaporkan barang – barang yang masih di kuasi oleh ASN dan belum tercatat dalam administrasi aset.
7. Untuk memaksimalkan pembiayaan akan di lakukan pendataan Kembali kebutuhan sehingga di hasilkan data akurat untuk perencanaan seluruh kebutuhan Dinas, jika dalam tahun berjalan tidak terbiaya maka akan di lakukan penambahan biaya kepada anggaran perubahan.

Dengan melakukan Langkah – langkah solusi tersebut di harapkan bahwa dapat diharapkan menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi, hambatan pelaksanaan kegiatan, dan akan menghambat capaian sasaran program dan kegiatan OPD sehingga dapat menurunkan kinerja Pemerintah daerah. Dengan menjalankan tugas dan fungsi dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dapat di harapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik ( Good Governance) di Kabupaten Berau.

### 3.3.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 sasaran I.

#### II. III

**Tabel 3.10**

**Sasaran I, II, III Strategis**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Ket.</b>
Meningkatkan Implementasi Pengarusutaman Gender	Presentase OPD yang sudah melaksanakan PPRG	OPD	<b>29,8 %</b>	<b>0 %</b>	Kegiatan pelatihan tidak di laksanakan karena Pandemi Covid - 19
Meningkatkan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Presentase Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Kasus	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	
Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak ( KLA )	Peringkat	<b>Madya (650) Poin</b>	<b>Pratama (599 ) Poin</b>	

Realisasi Anggaran Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utaman Gender dan Anak untuk pencapaian sasaran I, II, III :

1. Untuk mengetahui apakah Pemerintahan Kabupaten Berau telah mendukung anggaran yang responsip gender (ARG) di Kabupaten Berau melalui anggaran belanja pada program dan kegiatan yang ada di OPD Pemerintah Kabupaten Berau.
2. Penangan Kasus yaitu bagaimana terhadap kasus yang dilaporkan dan kasus yang di tangani.
3. Bagaimana komitmen Pemerintah Daerah terhadap implementasi Kota Kabupaten Berau menjadi Kota Layak Anak tingkat Madya,

Adapun Anggaran dan realisasi dari program sebesar Rp. 1.374.503.352,-,- atau sebesar 86,39 % dari Anggaran Rp. 1.591.049.960,- serta realisasi fisknya sebesar 81,16 %.

### 3.3.2. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun lalu dan Beberapa tahun Terakhir sasaran I. II. III :

**Tabel 3.11**

#### **Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran I,II,III**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Ket
01.	Presentase OPD yang sudah melaksanakan <b>PPRG</b>	OPD	0%	0%	20 OPD / 23,4 %	0 %	
02.	Presentase Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Kasus	100 %	100 %	100 %	100 %	
03.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak ( KLA )	Peringkat	<b>Pratama</b>	<b>Pratama</b>	<b>Pratama</b>	<b>Pratama</b>	

### 3.3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi sasaran I. II. III :

Tabel 3.12

## Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran I,II,III

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target Jangka Menengah Dok. Renstra Organisasi	Selisih	Ket
01.	Presentase OPD yang sudah melaksanakan PPRG	OPD	0 %	38 % 18/47 OPD	18 OPD	
02.	Presentase Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Kasus	100 %	100 %	100 %	
03.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak ( KLA )	Peringkat	<b>Pratama</b>	<b>Madya</b>	<b>Madya</b>	

3.3.4. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Standar Nasional sasaran I. II. III :

Tabel 3.13

## Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran I,II,III

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Standar Nasional	Selisih	Ket
01.	Presentase OPD yang sudah melaksanakan <b>kan PPRG</b>	OPD	-	-	-	Belum di peroleh standar Nasional
02.	Presentase Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Kasus	-	-	-	

03.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak ( KLA )	Peringkat	-	-	-	
-----	---	-----------	---	---	---	--

**3.3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternative Solusi yang telah di lakukan :**

**a. Faktor – factor secara umum yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja anatara lain :**

1. Adanya komitmen untuk memperkuat dan mengedepankan peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang di berikan Kepala Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Adanya Komitmen dari semua Bidang pada OPD DPPKBP3A dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk tercapai target sasaran yang sudah di rencanakan.
3. Adanya Komitmen dari OPD terkait dalam hal Penganggaran ARG Pengarus utamaan Gender melalui PPRG ( Salah satu IKK Kabupaten Berau adalah Prosentase Anggaran Responsip Gender (ARG) terhadap Belanja Langsung APBD.
4. Memaksimalkan koordinasi dengan Gugus tugas KLA di Tahun 2021 dengan Advokasi ke Kepala Daerah
5. Advokasi ke DPRD untuk membuat Perda Inisiatif tentang KLA atau membuat Perda PPA dengan memasukkan pasal – pasl sapu jagat 9 Indikator 5 klaster dan 24 Indikator yang belum ada dalam Perda Teknis).

**b. Kendala – kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja tahun 2020 adalah :**

1. Dari 20 OPD yang sudah mendapatkan pelatihan PUG melalui PPRG masih belum sepenuhnya memahami dan mensosialisasi hasil pelatihan tersebut kepada semua pengelola Program / kegiatan yang ada di OPD masing - masing, sehingga pemahaman dari semua pengelola masih dangkal mengenai Anggaran Responsip Gender dari semua Program /

kegiatan yang di Kelola oleh dinas. Sehingga evaluasi IKK Kabupaten Berau adalah Prosentase Anggaran Responsip Gender (ARG) terhadap Belanja Langsung APBD. Hanya 2,16 % dari 20 OPD Anggaran Rp. 55.061.095.959,- terhadap APBD tahun 2019 Rp. 2.548.210.266.946,-

2. Perda yang ada belum mencakup 5 klaster dari 24 Indikator KLA
3. Gugus Tugas KLA belum terkoordinasi dengan maksimal
4. Profil Anak belum sesuai dengan yang di inginkan
5. Lembaga Masyarakat belum ada peningkatan dan belum terkoordinasinasi dengan baik tentang KLA
6. Dunia usaha tidak bisa mendapatkan data nya dengan baik terkait perannya di pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

**c. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi Kendala – kendala yang merupa penghambat dalam pencapaian rencana kinerja tahun 2020 antara lain :**

1. Akan melakukan penganggaran Pelatihan / Diklat ARG PUG melalui PPRG, Melakukan Road Show jemput bola ke OPD, serta melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada OPD yang telah mengikuti pelatihan pada tahun 2019. Sehingga Anggarn yang responsip Gender di OPD meningkat.
2. Advokasi ke DPRD untuk membuat Perda inisiatif tentang KLA atau membuat Perda PA dengan memasukkan pasal – pasal sapu jagat ( Indikator 5 klaster dan 24 indikator yang belum asa di dalam Perda Teknis)
3. Memaksimalkan Koordinasi Gugus Tugas KLA di tahun 2021 dengan Advokasi ke Kepala daerah.
4. Melakukan perbaikan dalam pembuatan Profil Anak dan menyiapkan anggaran untuk bekerjasama dengan BPS untuk pembuatan profil anak.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Masyarakat dengan baik tentang KLA
6. Bekerjasama dengan forum TJSL untuk mendapatkan data CSR terbaik terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

**3.3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran I, II, II :**

Pencapaian kinerja sasaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Berau dengan melakukan Pelatihan, Koordinasi dan Evaluasi kepada seluruh OPD dalam

penyusunan Anggaran Responsip Gender ( ARG ) melalui PPRG sehingga di peroleh hasil APBD Kabupaten Berau yang responsip Gender.. Juga dalam peningkatan Kabupaten / Kota Layak Anak ( KLA ) Kabupaten Berau telah melakukan beberapa Langkah – Langkah dalam upaca percepatan peringkat dalam penilaian KLA dengan melakukan Koordinasi Lintas OPD, Lembaga Masyarakat dan seluruh Unsur – unsur yang berhubungan dengan dukungan peningkatan KLA Kabupaten Berau.

**3.3.7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun atas efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran I, II, II :**

Keberhasilan / Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ini di dukung dan di laksanakan melalui 3 ( satu ) Program dengan 10 ( sepuluh ) Kegiatan yaitu :

**Program I.** Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan Kegiatan :

1. Pelatihan dan Road Show PUG melalui PPRG
2. Peningkatan kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
3. Kabupaten Layak Anak
4. Fasilitas Penguatan Kelembagaan PUSPAGA berbasis Hak Anak.
5. Pemenuhan Hak Anak
6. Fasilitas Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

**Program II.** Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan Kegiatan :

7. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak kekerasan

**Program III.** Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan Kegiatan :

8. Pembinaan Organisasi Perempuan
9. Expose Peningkatan Kualitas Perempuan dalam Pembangunan
10. Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima

**Sasaran IV :**

**IV. Keikutsertaan Pasangan Usia Subur ( PUS ) menjadi KB Aktif**

Indikator keberhasilan dalam capaian kinerja sasaran Keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS ) menjadi KB Aktif. Dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja (%)	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Keikut Sertaan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi KB Aktif	Presentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	76,03 %	74,83 %	74,83	74,75 %	75,66 %	76,54 %

**Tabel 3.15**  
**Capaian Anggaran Program Sasaran Strategis IV**

No.	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	ANGGARAN		Capaian Anggaran (%)
		TARGET	REALISASI	
1	2	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.359.376.300,-	Rp. 1.300.374.084,-	95,66
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	100
3.	Program Keluarga Berencana	Rp. 3,641.358.834,-	Rp. 2,940.347.262,-	80,73
4.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp. 111.024.500,-	Rp. 110.334.068,-	99,38
5.	Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera	Rp. 138.679.000,-	Rp. 135.679.000,-	97,61

Berdasarkan Tabel tersebut diatas maka dari 1 indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Keikut Sertaan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi KB Aktif dimana yang menjadi target adalah Pasangan Usia Subur baik itu peserta KB aktif atau Peserta KB Baru.

### Kondisi yang di capai :

Pada tabel dibawah memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 dari indikator kinerja “ Indikator keberhasilan dalam capaian kinerja sasaran Keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS ) menjadi KB Aktif “ di dapat capaian realisasi turun tidak mencapai target yang di rencanakan . Target yang di rencanakan Tahun 2020 KB Aktif 35,633 Akseptor dari Pasangan Usia Subur 46.809 pasangan dengan prosentase ( 76,03%) Adapun realisasi capaian sasaran Tahun 2020 KB Aktif 35.134 Akseptor dari Pasangan Usia Subur ( PUS ) 47.323 Pasangan dengan prosentase ( 74,24 %). Data ini menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja Keikutsertaan PUS menjadi KB Aktif di tahun 2020. Prosentase penurunan capaian dari target yang di tentukan sebesar 2,41 % pada tahun 2020.

**Tabel 3.16**  
**Target dan Capaian Realisasi**  
**Presentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR )**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja (%)
1	3	4	5	6
4.	Presentase Pemakaian Kontrasepsi ( CPR)	76,03 %	74,83 %	74,83

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Presentase Pemakaian Kontrasepsi ( CPR) tahun 2020 DPPKBP3A Kabupaten Berau melalui Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga telah melaksanakan berbagai kegiatan yaitu :

1. Pelayanan KB Mobile  
Melakukan pelayanan KB MKJP bergerak di daerah legokan
2. Meningkatkan KIE dan Konseling untuk kesertaan ber KB bagi PUS di daerah legokan.  
Daerah legokan adalah daerah dengan angka Unmeed Net ( masyarakat yang ingin ber KB tidak terlayani )
3. Penguatan SDM kepada kader dan IMP ( Institusi Masyarakat Pedesan ) oleh PKB di lini Lapangan.

Dengan memperkuat IMP akan menjadi perpanjangan tangan dari PKB sehingga informasi tentang program Banggakencana tersampaikan lebih dalam ke masyarakat

4. Memberi pemahaman dan Edukasi kepada masyarakat mengenai program Bangga Kencana.
5. Mengoptimalkan pelayanan kepesertaan ber KB di daerah legokan

Adapun Penunjang Program untuk mencapai sasaran IV tersebut ada 5 (lima)

Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
  - Penyediaan Surat menyurat Rp. 3.400.000,-
  - Penyediaan Jasa Komunikasi , Air dan Listrik Rp. 130.705.800,-
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan / operasional Rp. 209.217.500,-
  - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp. 116.193.000,-
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 18.000.000,-
  - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp. 37.145.000,-
  - Penyediaan Alat Tulis Rp. 21.000.000,-
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 26.201.000,-
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp. 7.149.000,-
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 13.965.000,-
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 12.250.000,-
  - Penyediaan Bahan bacaan dan Perundang – undangan Rp. 7.500.000,-
  - Penyediaan makan Minum Rp. 84.500.000,-
  - Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Rp. 165.000.000,-
  - Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Rp. 55.000.000,-
  - Penyediaan Jasa Tenaga Adm / Teknis Perkantora Rp. 452.150.000,-
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Kinerja SKPD
3. Program Keluarga Berencana
  - Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

- Penyediaan Saprass KB ( DAK Fisik 2020)
  - Bantuan Operasional KB ( DAK BOKB 2020)
  - Pendampingan DAK BOKB dan DAK Fisik
  - Sosialisasi / Pelatihan Jaminan Pelayanan KB bagi Klinik KB, dr. Praktek dan Bidan Peraktek
  - Advokasi dan Komunikasi informasi dan Rdukasi ( KIE ) Kreatif Kampung KB
4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- Pembinaan PIK Remaja / Mahasiswa di Kabupaten Berau
5. Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera.
- Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS
  - Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kelompok BKB, BKR, BKL.

Secara keseluruhan Program yang mendukung pencapaiannya sasaran IV yaitu terdiri dari 1 ( satu ) program prioritas dengan 5 ( lima ) kegiatan dan 4 (empat ) program penunjang dengan 20 (dua puluh) kegiatan. Dengan total dana sebesar Rp. 5.270.438.634,-. Adapun realisasi indikator kinerja Outcome tahun 2020 untuk program kegiatan Keluarga Berencana dapat di uraikan sebagai berikut :

**3.3.8. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 (Sasaran IV) :**

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan antar Target dan Realisasi**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Ket.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Keikut Sertaan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi KB Aktif	Presentase Pemakaian kontrasepsi ( CPR)	Prosentase (%) )	76,03 %	74,83 %	

Realisasi dana program Keluarga Berencana untuk pencapaian sasar IV (empat ) Keikutsertaan Pasangan Usia Subur ( PUS ) menjadi KB Aktif target kinerja tahun 2020 capain tidak sesuai dengan target yang direncanakan sebesar 76,03 % dari 35,633 KB Aktif di banding 46.806 Pasangan Usia Subur ( PUS ) realisai hanya sebesar 74,83 % dari 35.134 KB Aktif di banding 47.323 PUS. Data ini menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja Keikutsertaan PUS menjadi KB Aktif di tahun 2020. Prosentase penurunan capaian dari target yang di tentukan sebesar 2,41 % pada

tahun 2020. Namun capaian kinerja Skala nilai sebesar ( 74,83%) kategori penilaian **Sedang** Untuk realisasi program Keluarga Berencana dari Anggaran Rp. 3.641.358.834,- Realisai Rp. 2.940.847.262,- dengan skala nilai ( 80,76) kategori penilaian **Baik**

**3.3.9. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ( Sasaran IV )**

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 - 2020 sasaran IV**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Ket
01.	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi ( CPR )	%	74,75 %	75,66%	76,54 %	74,83 %	

**3.3.10. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ( sasaran IV )**

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan target Jangka Menengah sasaran IV**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target Jangka Menengah Dok. Perencanaan Strategis Organisasi	Selisih	Ket.
01.	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi ( CPR )	%	74,83 %	77 %	2,17 %	

**3.3.11. Membandingkan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional ( Sasaran IV )**

**Tabel 3.20**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan target Jangka Menengah sasaran IV**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Standar Nasional	Selisih	Ket.
-----	-------------------	--------	----------------	------------------	---------	------

01.	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi ( CPR )	%	76,03 %	62,16 %	13,87 %	
-----	--	---	---------	---------	---------	--

**3.3.12. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan ( Sasaran IV )**

- a. Faktor – faktor secara umum yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja anatar lain :
1. Adanya komitmen Pimpinan untuk memperkuat dan mengedepankan peran DPPKBPP3A dalam melaksanakan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
  2. Adanya Komitmen dari seluruh Bidang – bidang yang ada di DPPKBPP3A untuk menyempurnakan Dokumen Kinerja Bidang / Perencanaan sehingga Renstra yang di buat sesuai dengan tugas dan fungsi dari semua bidang.
  3. Adanya Kerjasama yang baik antara DPPKBPP3A dengan unit unit pelayanan KB ( Faskes ), PKB, PPKB, , Sub PPKBD, Akseptor KB dan seluruh unsur unsur yang terkait dalam pelayanan KB.
- b. Kendala – kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja adalah :
1. Jumlah pasangan usia subur ( PUS ) mengalami peningkatan yang signifikan di masa pandemic Covid 19 sehingga mempengaruhi capaian CPR
  2. Belum terlayannya seluruh peserta KB yang berada di daerah legokan di karenakan lokasi tempat tinggal jauh dari tempat pelayanan.
  3. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang KB MKJP Kontap
  4. Tenaga PLKB/PKB sebagai monivator KB sangat terbatas dari 110 Kampung / Kelurahan untuk tenaga PKB/PLKB hanya 16 orang sehingga mengalami kesulitan dalam pengelolaal program lini lapangan.

5. Masih terbatas sarana pelayanan KB , belum semua puskesmas memiliki meja obgyn dan iud Kit untuk pelayanan KB IUD
  6. Belum semua tenaga pelayanan KB ( Bidan ) yang sudah mendapatkan pelatihan sertifikasi CTU sebagai dasar untuk melayani akseptor implant dan IUD.
  7. Masih banyaknya masyarakat yang berada di pedesaan yang belum mendapat pendampingan
- c. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala – kendala yang merupakan penghambatan dalam pencapaian rencana kinerja antara lain :
1. Melakukan peningkatan KIE dan Konseling kepada masyarakat khususnya PUS untuk kesertaan ber KB
  2. Akan melakukan peningkatan anggaran kegiatan sehingga dapat memfasilitasi PUS untuk menjadi peserta KB Aktif di daerah legokan.
  3. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah / Pemerintah Provinsi untuk melakukan seleksi penambahan petugas pelayanan KB (PK / PLKB )
  4. Perlu adanya peningkatan sarana KB melalui kegiatan DAK Fisik tahun 2021.
  5. Akan mengikut sertakan petugas KB yang belum memiliki sertifikasi CTU dalam Pelatihan dan Pendidikan CTU yang akan dilaksanakan oleh DPPKB3A pada tahun 2021.

### **3.3.13. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber daya ( Sasaran IV )**

Pencapaian Kinerja sasaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Berau melalui DPPKB3A dalam melakukan kewenangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sehingga Keikut Sertaan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi KB Aktif semakin meningkat dan menghindari ledakan penduduk yang tidak diharapkan dengan melalui Program Keluarga Berencana dan Program penunjang lainnya. Namun kenyataannya capaian kinerja belum mencapai sesuai dengan perencanaan, Hal ini juga di karenakan masih sangat terbatasnya Tenaga PKB / PLKB yang jumlahnya hanya 16 orang di bandingkan dengan 110 kampung / kelurahan yang di layani. Sehingga sangat di perlukan peningkatan SDM bagi PKB yang ada dan penambahan jumlah PKB di sesuaikan dengan kebutuhan kampung yang ada.

### 3.3.14. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ( Sasaran IV )

Keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ini di dukung dan dilaksanakan melalui 1 ( satu ) program prioritas dengan 4 (empat) program pendukung.

1. Program Keluarga Berencana
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistenn Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

### 3.4. Realisasi Anggaran

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau, Anggaran tahun 2020 dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 di bandingkan Anggaran dan realisasi tahun 2019 dari Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Pendapatn Retribusi Daerah tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 3.21**  
**Realisai Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 dan 2019**

No.	Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6
01.	2019	BTL	5.748.042,500,-	5.280.304.544,-	91,86
02.	2020	BTL	5.527.875.000,-	4.921.668.094,-	89,03

Realisasi Belanja Tidak Langsung jika di bandingkan realisasi tahun 2020 dengan tahun 2019 adanya penurunan serapan sebesar ( 2,83 % ) hal tersebut di karenakan adanya ASN yang sudah purna tugas sehingga anggaran yang telah di rencanakan tidak terrealisasi. Namun jika di ukur dari skala penilaian realisasi ( 89,03 % ) tersebut pada skala kategori penilaian **Baik**

**Tabel 3.22**  
**Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020 dan 2019**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosentase</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.	2019	Belanja Langsung	9.500.031.500,-	7.567.427.590,-	79,66
02.	2020	Belanja Langsung	7.220.467.344,-	6.129.675.566,-	84,89

Realisasi Belanja langsung jika di bandingkan realisasi tahun 2020 dengan tahun 2019 adanya kenaikan serapan sebesar ( 5,23 % ) walaupun ada 2 kegiatan yang tidak mencapai target kinerja. Namun serapan realisasi Anggaran Belanja Langsung sebesar ( 84,89 % ) tersebut pada skala kategori penilaian **Baik**.

**Tabel 3.23**  
**Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 dan 2019**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosentase</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.	2019	Retribusi Daerah	66.000.000,-	78.750.000,-	119
02.	2020	Retribusi Daerah	43.500.000,-	32.210.000,-	74,04

Realisasi Retribusi Daerah Pinjam Pakai Gedung Busak Mallur jika di bandingkan realisasi tahun 2020 dengan tahun 2019 adanya penurunan target dan penurunan realisasi sebesar (44,96 %) dari tahun 2019 Hal tersebut di karenakan adanya Wabah Covid 19 . Sehingga tidak dilakukannya Pinjam Pakai Gedung Busak Mallur. Namun Realisasi Retribusi sebesar (74,04 % ) tersebut pada skala kategori penilaian **Sedang**.